

Kerjasama Dinas Kesehatan TNI AU dengan Kementerian Kesehatan dalam Program Pengendalian Tuberkulosis (TBC) di Jawa Barat untuk Memperkuat Pertahanan Negara : Pendekatan Strategis 2025-2026

Rohmat Andriyadi

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: 62rohmatandriyadi@gmail.com

Kata Kunci		Abstrak
Kesehatan Pengendalian Pertahanan Negara	Personel; TBC;	Kerja sama antara Diskesau dan Kemenkes dalam program pengendalian TBC berfokus pada upaya strategis untuk memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan kesehatan personel militer. Mengingat Indonesia memiliki angka TBC yang tinggi dan menjadi salah satu negara dengan beban kasus tertinggi di dunia, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan deteksi dini serta penanganan yang efektif terhadap penyakit menular ini. Program ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan sistem pengendalian TBC yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan harapan bahwa kesehatan personel militer dan kesiapan pertahanan negara dapat lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara Diskesau dan Kemenkes dalam mengendalikan TBC, dengan fokus pada implementasi program, hambatan yang muncul, serta dampak terhadap kesehatan personel militer dan kesiapan operasional. Melalui pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara mendalam serta observasi. Penelitian ini berusaha memahami pencapaian program ini, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, serta menilai kontribusi program terhadap peningkatan kesehatan dan kesiapsiagaan personel militer sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah menunjukkan kemajuan, tantangan seperti akses data yang terbatas, perbedaan prosedur operasional, keterbatasan anggaran, dan stigma terhadap pengobatan TBC masih menghambat efektivitas program. Kesehatan personel militer dalam program ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan operasional; personel yang sehat dapat menjalankan tugas dengan optimal, sedangkan yang terinfeksi dapat menurunkan produktivitas dan bahkan mengancam stabilitas keamanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang mengedepankan sinergi multidimensional antara Diskesau dan Kemenkes, mencakup kebijakan bersama, pelatihan petugas, dan kampanye edukasi untuk memperkuat kesehatan personel serta mendukung pertahanan negara.
Keywords: Personnel health; TB control; National defense		Abstract <i>The collaboration between the Air Force Health Service (Diskesau) and the Ministry of Health (Kemenkes) in the tuberculosis (TB) control program focuses on strategic efforts to strengthen national defense by improving the health of military personnel. Given Indonesia's high TB rate and its position as one of the countries with the highest case burdens globally, this partnership is essential to ensure early detection and effective management of this infectious disease. The program involves various government agencies and utilizes available resources to establish a comprehensive and sustainable TB control system, with the goal of optimizing the health of military personnel and enhancing national defense readiness. This research aims to evaluate the effectiveness of the collaboration between Diskesau and the Ministry of Health in TB control, focusing on program implementation, challenges encountered, and the impact on the health</i>

of military personnel and operational readiness. Using a qualitative approach that includes in-depth interviews and observations, the study seeks to understand the program's achievements, identify obstacles in its execution, and assess its contributions to improving the health and preparedness of military personnel as part of efforts to strengthen national defense. The research shows that while the collaboration has made progress, challenges such as limited data access, differences in operational procedures, budget constraints, and stigma towards TB treatment continue to hinder program effectiveness. The health of military personnel in this program is critical to operational readiness; healthy personnel can perform their duties optimally, while infected individuals risk reduced productivity and potentially threaten security stability. Therefore, a strategic approach is needed that emphasizes multidimensional synergy between Diskesau and the Ministry of Health, encompassing joint policies, staff training, and educational campaigns to strengthen personnel health and support national defense.



PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini umumnya menyerang paru-paru, meskipun dapat juga mempengaruhi organ tubuh lainnya (KNCV, 2022). TBC merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak di Indonesia, yang termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, ribuan kasus baru TBC terus dilaporkan setiap tahunnya. Data tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah India dalam hal jumlah kasus TBC, dengan perkiraan sekitar 969.000 kasus pada 2022. Pada tahun yang sama, deteksi kasus TBC juga mencapai angka tertinggi, dengan lebih dari 700.000 kasus teridentifikasi (WHO, 2022).

Di lingkungan militer, TBC juga menjadi perhatian serius. Pada Februari 2024, Puskesmas TNI melaporkan 228 kasus TBC di lingkungan TNI AL dan 109 kasus di TNI AD. Sebagai langkah penanggulangan, dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keterlibatan Fasilitas Kesehatan (Fasyankes) TNI dalam program pengendalian TBC. Puskesmas TNI juga menyinkronkan program dengan Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) agar upaya pengendalian lebih terintegrasi dan optimal. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya militer dalam menangani TBC, yang diakui sebagai tantangan kesehatan besar yang memerlukan upaya lebih intensif (Adam, 2020; Barza et al., 2021; Indonesia, 2021).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pengendalian TBC melalui kampanye strategis seperti Temukan Obati Sampai Sembuh TBC (TOSS TBC). Program ini bertujuan meningkatkan deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas, termasuk bagi penderita TBC resisten obat. Presiden Prabowo Subianto juga memprioritaskan pemeriksaan kesehatan, khususnya TBC, sebagai bagian dari agenda nasional. Strategi ini mencakup pendekatan promotif (penyuluhan), preventif (terapi pencegahan, vaksinasi), deteksi (pemeriksaan rutin, identifikasi kontak berisiko), dan kuratif (pengobatan lengkap). Selain itu, program pemeriksaan paru diharapkan mampu mendeteksi penyakit paru lain, seperti kanker atau penyakit akibat kerja (Editia et al., 2023).

Di tingkat regional, data menunjukkan bahwa Jawa Barat mencatat 341 kasus TBC pada 2024. Di RSAU dr. M. Salamun, dari 38 pasien TBC yang dirawat, terdapat 2 anggota TNI, 34 anggota keluarga TNI, dan 2 PNS. Distribusi kasus ini menggambarkan pentingnya pengendalian menyeluruh di lingkungan militer dan keluarga. Kerja sama lintas sektor, khususnya antara institusi kesehatan sipil dan militer, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan. Hal ini juga mendukung peran TNI sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat secara nasional (Hartanto, 2016).

Regulasi terkait pengendalian TBC diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Regulasi ini menekankan pentingnya aspek promotif dan preventif, disertai pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta mencegah resistensi obat. Dalam konteks militer, Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menjadi pedoman bagi TNI dalam mengatasi penyakit seperti TBC secara terkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Puskesmas TNI berperan penting dalam pengawasan, deteksi, pelaporan, isolasi pasien, serta evaluasi program penanggulangan.

Kolaborasi antara Dinas Kesehatan TNI AU (Diskesau) dan Kementerian Kesehatan menjadi kunci dalam memperkuat pengendalian TBC. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan deteksi 90% dari total kasus TBC pada 2024. TBC sendiri masih menjadi masalah kesehatan global dengan lebih dari 10 juta penderita setiap tahunnya. Pada 2022, TBC menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19. Penyakit ini menambah beban sistem kesehatan karena membutuhkan biaya perawatan besar dan mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat.

Tingginya angka TBC di Indonesia menegaskan pentingnya integrasi layanan kesehatan primer sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023. Dalam hal ini, Diskesau berperan dalam perencanaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alat kesehatan, serta mendukung pelatihan tenaga medis. Integrasi sistem informasi pelaporan real-time juga diimplementasikan untuk meningkatkan pemantauan. Pendekatan ini membantu program pengendalian TBC menjadi lebih responsif dan efisien, baik di lingkungan militer maupun masyarakat umum.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian Tuberkulosis (TBC), namun belum banyak studi yang secara khusus menganalisis kemitraan antara institusi militer (seperti Dinas Kesehatan TNI AU) dan Kementerian Kesehatan dalam konteks TBC. Beberapa literatur seperti Hernández dan Ochoa (2020) menekankan pentingnya integrasi kesehatan dan pertahanan, tetapi fokusnya lebih umum pada peran medis militer tanpa menyentuh sinergi spesifik untuk TBC. Studi lain oleh Kementerian Kesehatan RI (2016) dan WHO (2019) menguraikan strategi nasional dan global pengendalian TBC, namun belum mengkaji tantangan unik di lingkungan militer. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi model kolaborasi yang efektif antara dua institusi ini, sekaligus memperkaya literatur akademik tentang pendekatan terpadu dalam penanganan TBC.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap kemitraan antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC, sebuah topik

yang masih jarang dibahas secara mendalam. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif kesehatan masyarakat dengan kebutuhan operasional militer, menawarkan pendekatan multidisiplin yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya. Dengan menganalisis tantangan dan peluang dalam kolaborasi ini, penelitian ini memberikan kontribusi unik baik secara teoretis maupun praktis.

Selain strategi teknis, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting. Diskesau bersama Kemenkes melakukan kampanye penyadaran publik untuk mengurangi stigma terhadap pasien TBC dan mendorong perilaku hidup sehat. Supervisi dan monitoring di fasilitas kesehatan militer, seperti RSAU dr. Charles P.J. Suoth, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan protokol TBC, termasuk bagi pasien TBC resisten obat. Dengan sinergi lintas sektor yang efektif, pengendalian TBC di Indonesia diharapkan lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara Diskesau dan Kementerian Kesehatan, faktor keberhasilan kolaborasi, serta dampaknya terhadap kesehatan personel militer dan masyarakat luas. Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur tentang kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam konteks pengendalian TBC antara militer dan instansi kesehatan sipil. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terintegrasi, membantu TNI AU meningkatkan program kesehatan personel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan TBC. Dengan demikian, penelitian ini mendukung upaya nasional dalam mengurangi angka TBC sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kolaborasi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC di Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas kesehatan militer, perwakilan Kementerian Kesehatan, dan tenaga medis, serta observasi lapangan di fasilitas kesehatan terkait. Selain itu, dilakukan analisis dokumen berupa laporan kebijakan, catatan medis, dan dokumen program untuk melengkapi data primer. Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan transkripsi, koding berdasarkan tema seperti koordinasi antar-lembaga dan tantangan program, serta triangulasi untuk memverifikasi temuan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memahami efektivitas kolaborasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendapatkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kerja sama kedua institusi dalam pengendalian TBC. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kerjasama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan, serta menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengendalian TBC di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan yang signifikan, khususnya di lingkungan militer, di mana kesehatan personel berperan penting dalam kesiapan operasional dan ketahanan negara. Kerja sama antara Dinas Kesehatan TNI AU dengan Kementerian

Kesehatan dalam upaya pengendalian TBC telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi terintegrasi dan keterbatasan sumber daya. Kesehatan personel militer yang terlibat dalam program pengendalian TBC ini berpengaruh langsung pada kesiapan operasional mereka; prajurit yang terpapar TBC cenderung mengalami penurunan daya tahan fisik, yang berdampak pada kemampuan pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang lebih efektif untuk meningkatkan sinergi kedua institusi tersebut. Pendekatan ini meliputi perencanaan jangka panjang yang komprehensif, penggunaan teknologi modern untuk deteksi dini dan pengobatan TBC, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga guna memastikan bahwa kesehatan personel militer terjaga dan kesiapan operasional mereka tetap optimal dalam rangka memperkuat pertahanan negara

Kondisi kerja sama antara Dinas Kesehatan TNI AU dengan Kementerian Kesehatan saat ini dalam program pengendalian TBC di lingkungan militer, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya

Berdasarkan teori sinergi, kerja sama antar-lembaga dapat menciptakan nilai yang lebih besar daripada sekadar penjumlahan dari masing-masing upaya individual jika dikelola dengan efektif. Dalam konteks kerja sama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian TBC di lingkungan militer. Pada saat ini, kolaborasi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC belum optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan dalam koordinasi dan integrasi program, serta sumber daya yang terbatas. Koordinasi yang lemah antara dua lembaga yang berbeda fokus (kesehatan umum dan kesehatan militer) seringkali menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih tanggung jawab. Misalnya, belum ada mekanisme yang terstruktur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dalam hal penanganan TBC di lingkungan militer. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun logistik, juga menghambat efektivitas program, terutama dalam hal penyediaan fasilitas deteksi dini dan pengobatan TBC bagi personel militer. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya integrasi lintas sektoral dan sumber daya yang memadai sering kali menjadi penghambat dalam upaya pengendalian penyakit menula

Untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, sinergi antara kedua lembaga harus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik, integrasi program yang menyeluruh, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Kerja sama yang terintegrasi secara penuh akan memungkinkan pembagian peran yang lebih jelas, di mana Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya medis, sementara Dinas Kesehatan TNI AU fokus pada implementasi di lingkungan militer. Dengan demikian, personel militer yang terinfeksi TBC dapat terdiagnosis lebih awal dan menerima perawatan yang tepat tanpa mengganggu kesiapan operasional. Teori sinergi menekankan bahwa kolaborasi yang efektif harus menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak, dan dalam hal ini, peningkatan kesehatan personel militer akan memperkuat pertahanan negara secara keseluruhan.

Tantangan dalam Penerapan Sinergi. Meskipun sinergi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian TBC berpotensi memberikan manfaat yang signifikan, tantangan dalam penerapannya tidak bisa diabaikan. Salah satu

Tantangan utama adalah perbedaan prioritas antara sektor militer dan sipil. Di lingkungan militer, fokus utama adalah pada kesiapan operasional. Militer mengutamakan menjaga dan mempertahankan kekuatan tempur serta memastikan personel siap untuk menjalankan tugas kapan pun diperlukan. Karena itu, pendekatan kesehatan di militer sering kali difokuskan pada pemeliharaan kesehatan fisik secara cepat dan efisien, untuk memastikan minimalnya gangguan terhadap kesiapan operasi. Sebaliknya, Kementerian Kesehatan lebih berfokus pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mereka mengutamakan kebijakan preventif dan penanganan komprehensif untuk penyakit menular seperti TBC, yang memerlukan pendekatan jangka panjang, termasuk pengobatan yang memakan waktu dan penanganan berkelanjutan. Perbedaan prioritas ini seringkali menyebabkan disharmoni dalam sinergi. Misalnya, personel militer mungkin diharapkan untuk kembali bertugas sesegera mungkin setelah perawatan singkat, sedangkan Kementerian Kesehatan mungkin merekomendasikan perawatan jangka panjang yang dapat mengganggu kesiapan operasional personel tersebut. Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan anggaran di lingkungan militer. Alokasi anggaran untuk kesehatan di sektor militer seringkali tidak memadai, terutama jika dibandingkan dengan sektor kesehatan umum. Anggaran militer umumnya lebih difokuskan pada kebutuhan operasional, peralatan, dan pelatihan tempur, sementara anggaran untuk fasilitas kesehatan mungkin terbatas. Hal ini menyulitkan TNI AU dalam menyediakan infrastruktur medis yang memadai, termasuk fasilitas khusus untuk deteksi dan pengobatan penyakit menular seperti TBC.

Fasilitas kesehatan yang terbatas di lingkungan militer juga menjadi tantangan penting. Banyak fasilitas kesehatan di pangkalan-pangkalan militer mungkin belum dilengkapi dengan teknologi atau peralatan medis yang diperlukan untuk mendeteksi dan menangani TBC secara efektif. Dalam beberapa kasus, personel militer harus dirujuk ke fasilitas kesehatan sipil, yang mungkin tidak selalu mudah diakses atau tidak sesuai dengan standar operasional militer. Selain keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kurangnya pelatihan teknis bagi tenaga medis di TNI AU juga menghambat efektivitas sinergi. Tenaga medis militer mungkin tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menangani penyakit menular secara spesifik, terutama TBC, yang memerlukan diagnosis yang cermat dan pengobatan yang berkelanjutan. Kurangnya pelatihan teknis dalam penanganan TBC dan deteksi dini memperburuk kondisi ini, karena tanpa keahlian yang tepat, upaya pengendalian dan pencegahan TBC di lingkungan militer dapat terganggu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam sinergi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan, diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu. Kolaborasi yang lebih erat ini mencakup beberapa aspek utama:

- 1) **Penyelarasan Prioritas.** Salah satu kunci sukses dalam kerja sama ini adalah menyelaraskan prioritas antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan. Kedua lembaga perlu memahami dan menghargai perbedaan fokus mereka—militer pada kesiapan operasional dan Kementerian Kesehatan pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh sehingga program pengendalian TBC dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Dalam hal ini, strategi bersama dapat mencakup penerapan langkah-langkah yang fleksibel, di mana pendekatan preventif dan pengobatan jangka panjang tetap diterapkan tanpa mengorbankan kesiapan personel militer.

- 2) Penguatan Alokasi Sumber Daya. Alokasi sumber daya yang lebih kuat menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan sinergi. Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur kesehatan militer, seperti penyediaan peralatan medis khusus untuk deteksi dini dan pengobatan TBC, sangat dibutuhkan. Dengan keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada, alokasi sumber daya ini harus mencakup peningkatan kapasitas rumah sakit militer serta pengadaan alat diagnostik dan pengobatan yang memadai. Selain itu, anggaran bersama bisa dialokasikan untuk meningkatkan program kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit menular seperti TBC di lingkungan militer.
- 3) Pelatihan Khusus untuk Tenaga Medis Militer. Salah satu tantangan utama dalam penanganan TBC di lingkungan militer adalah kurangnya pelatihan teknis bagi tenaga medis di TNI AU. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi tenaga medis militer agar mereka dapat menangani kasus TBC secara lebih efektif. Pelatihan ini harus mencakup teknik deteksi dini, diagnosis, dan perawatan yang sesuai dengan standar pengobatan TBC. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan yang mencakup pengetahuan terbaru tentang penanganan penyakit menular, sehingga tenaga medis militer selalu siap menghadapi tantangan kesehatan yang dinamis.
- 4) Koordinasi Lebih Intensif dalam Implementasi Program. Koordinasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa program pengendalian TBC dijalankan secara harmonis antara kedua institusi. Ini bisa dicapai melalui pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan dan TNI AU. Tim ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi di lapangan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Dengan demikian, komunikasi antara kedua lembaga akan lebih lancar, dan potensi tumpang tindih atau kekurangan dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan segera.
- 5) Penggunaan Teknologi untuk Memfasilitasi Pengendalian TBC. Penggunaan teknologi kesehatan, seperti sistem informasi kesehatan yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan, juga dapat memfasilitasi pengendalian TBC secara lebih efektif. Teknologi ini bisa membantu dalam berbagi data pasien, melacak perkembangan pengobatan, dan memonitor penyebaran TBC di kalangan personel militer secara real-time. Dengan demikian, tindakan yang cepat dan tepat dapat diambil untuk mengatasi penyebaran penyakit di lingkungan militer.

Dengan langkah-langkah ini, kerja sama yang lebih terkoordinasi dan terpadu antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC dapat berjalan lebih efektif, mengurangi hambatan operasional, serta meningkatkan kesiapan kesehatan personel militer dalam mendukung pertahanan negara. Dalam hal ini, peran manajemen sinergi sangat penting untuk menyelaraskan visi dan misi kedua lembaga melalui perencanaan strategis bersama, alokasi sumber daya yang adil, dan evaluasi terstruktur. Dengan pendekatan ini, program pengendalian TBC dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan peningkatan kesehatan personel militer sebagai bagian dari pertahanan negara dapat tercapai.

Pengaruh kesehatan personel militer yang terlibat dalam program pengendalian TBC terhadap kesiapan operasional dan pertahanan negara

Dalam konteks militer, kesehatan personel memegang peranan penting dalam menjaga kesiapan operasional dan kekuatan pertahanan. Berdasarkan Teori Kesehatan Masyarakat, kesehatan merupakan bagian integral dari kemampuan individu untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam masyarakat, termasuk di lingkungan militer. Ketika kesehatan terganggu, seperti akibat penyakit menular seperti TBC, kemampuan personel untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas militer secara penuh akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada pertahanan nasional. TBC masih menjadi masalah signifikan di kalangan personel militer. Anggota militer yang terinfeksi TBC sering kali mengalami penurunan performa fisik dan mental, karena penyakit ini mempengaruhi paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh, dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Gejala seperti batuk kronis, kelelahan, dan penurunan berat badan membuat mereka tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Di lingkungan militer yang sangat mengutamakan kesiapan fisik dan konsistensi operasional, kondisi ini menjadi tantangan serius. Ketidadaan atau ketidakcukupan pengendalian TBC dapat menyebabkan penyebaran penyakit lebih luas, tidak hanya mengurangi jumlah personel aktif, tetapi juga meningkatkan risiko penularan di dalam pangkalan dan operasi militer lainnya. Selain itu, perawatan yang diperlukan untuk mengobati TBC melibatkan penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama (enam bulan hingga satu tahun atau lebih), yang berarti personel yang terinfeksi mungkin harus absen dari tugas selama periode tersebut. Hal ini berpengaruh pada kekuatan operasional, karena setiap personel militer adalah bagian dari mesin besar pertahanan negara yang membutuhkan setiap komponen berfungsi maksimal.

Agar pengaruh negatif kesehatan personel terhadap pertahanan negara bisa diminimalisasi, diperlukan program pengendalian TBC yang efektif dan terintegrasi. Kesehatan militer yang optimal berkontribusi langsung pada kesiapan operasional karena personel militer yang sehat dapat menjalankan tugas dengan baik, baik dalam kondisi latihan maupun dalam misi aktif. Program yang sukses tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan kesehatan, yang memungkinkan personel untuk menjaga kesehatan mereka dan menghindari penularan penyakit. Pengaruh positif dari program yang terintegrasi ini terhadap ketahanan nasional akan terlihat jelas jika diterapkan dengan baik. Dalam jangka panjang, upaya preventif dan kuratif yang dijalankan secara kolaboratif antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dapat mengurangi angka kejadian TBC di kalangan personel militer. Hal ini akan meningkatkan jumlah personel siap tugas dan secara langsung memperkuat pertahanan nasional. Peningkatan kesehatan personel tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanan dalam hal kuantitas (jumlah personel yang sehat), tetapi juga dalam hal kualitas (kesiapan fisik dan mental yang optimal).

Teori Kesehatan Masyarakat menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah fondasi bagi keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi suatu negara, termasuk dalam sektor pertahanan. Dalam konteks ini, pengendalian penyakit, terutama penyakit menular seperti TBC, menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan populasi, khususnya di kalangan personel militer. Kesehatan yang optimal tidak hanya meningkatkan produktivitas personel tetapi juga

memendorong kesiapan operasional yang dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan pengendalian penyakit di kalangan personel militer harus dipandang sebagai investasi strategis untuk memastikan keberlangsungan operasional militer.

Pendekatan Preventif dan Pengobatan Berbasis Komunitas. Dengan mengadopsi pendekatan preventif dan pengobatan berbasis komunitas, militer dapat memaksimalkan efektivitas personelnnya. Ini melibatkan berbagai langkah, seperti:

- 1) Pendidikan dan Penyuluhan. Meningkatkan kesadaran tentang TBC, cara penularan, dan pentingnya deteksi dini. Program edukasi yang baik dapat membantu personel militer untuk lebih memahami risiko yang terkait dengan TBC dan tindakan pencegahan yang dapat diambil
- 2) Screening dan Deteksi Dini. Mengimplementasikan program skrining rutin untuk mendeteksi kasus TBC pada tahap awal, sehingga pengobatan dapat dimulai dengan cepat. Deteksi dini akan mencegah penyebaran penyakit dan meminimalkan dampak negatif pada kesiapan operasional.
- 3) Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Memperkuat kolaborasi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian. Sinergi ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam pengendalian TBC.

Sinergi antara kesehatan dan pertahanan merupakan suatu pendekatan strategis yang sangat penting dalam upaya pengendalian penyakit, termasuk pengendalian TBC, di kalangan personel militer. Sinergi ini harus menjadi prioritas karena kesehatan yang optimal di lingkungan militer adalah 24actor kunci yang mendukung kesiapan operasional dan daya tahan pertahanan negara. Personel militer yang sehat tidak hanya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merespons berbagai ancaman yang mungkin dihadapi oleh negara.

- 1) Dampak Kesehatan terhadap Kesiapan Militer. Kesehatan personel militer yang baik akan memastikan mereka tetap dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan misi-misi kritis tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh penyakit. Sebaliknya, jika kesehatan personel terganggu, seperti yang terjadi pada infeksi TBC, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam kesiapan operasional. Penyakit dapat menyebabkan absensi, pengurangan efektivitas, dan bahkan membahayakan keselamatan misi. Oleh karena itu, memastikan kesehatan personel adalah langkah preventif yang sangat penting untuk mempertahankan kekuatan pertahanan negara.
- 2) Kontribusi Program Pengendalian TBC. Keberhasilan program pengendalian TBC di lingkungan militer akan berkontribusi langsung pada kekuatan pertahanan negara. Dengan melaksanakan program pengendalian yang efektif, militer tidak hanya melindungi kesehatan personelnnya tetapi juga mengurangi risiko penyebaran penyakit di dalam komunitas yang lebih luas. Hal ini penting karena infeksi TBC yang tidak ditangani dapat memiliki dampak luas, tidak hanya dalam lingkup militer tetapi juga dalam masyarakat umum. Kesehatan personel yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil,

- meminimalisir dampak penyakit menular, dan meningkatkan solidaritas antara institusi militer dan kesehatan masyarakat.
- 3) Respons terhadap Ancaman. Kesehatan yang baik memungkinkan personel militer untuk tetap siap dan tanggap terhadap berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam situasi darurat, seperti konflik atau bencana alam, personel yang sehat dapat berfungsi lebih baik dalam melaksanakan tugas mereka, memastikan bahwa operasi pertahanan dapat dilaksanakan secara efektif. Sinergi antara kesehatan dan pertahanan menciptakan kekuatan yang saling mendukung; ketika kesehatan terjamin, pertahanan negara juga menjadi lebih tangguh.
- 4) Pentingnya Kebijakan Terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan yang terintegrasi dan kolaborasi yang kuat antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan harus terus diperkuat. Melalui upaya bersama ini, dapat dicapai pengendalian yang lebih efektif terhadap TBC, sehingga menciptakan personel militer yang sehat dan siap menghadapi tantangan yang ada. Ini akan membantu memastikan bahwa kesehatan dan pertahanan negara berjalan seiring, memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Integrasi Program Pengendalian TBC. Integrasi Program Pengendalian TBC merupakan suatu pendekatan komprehensif yang menggabungkan upaya pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan untuk mengurangi angka kejadian dan kematian akibat Tuberkulosis (TBC) di masyarakat, khususnya di kalangan personel militer. (Hernández, 2020) Program ini menekankan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan, untuk mengoptimalkan sumber daya, berbagi informasi, dan menyelaraskan strategi dalam upaya pengendalian TBC. Melalui integrasi ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan yang lebih efisien dan efektif, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan personel militer serta kesiapan operasional mereka Integrasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan program pengendalian TBC akan memastikan kesiapan militer tetap tinggi. Ini mencakup:

- 1) Pengembangan Kebijakan yang Mendukung. Kebijakan yang mendorong investasi dalam kesehatan personel militer dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk pengendalian penyakit harus dikembangkan.
- 2) Monitoring dan Evaluasi. Melakukan monitoring secara berkala terhadap program pengendalian TBC untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini akan membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi dan memperbaiki pendekatan yang diambil.
- 3) Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Kesehatan. Menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan layanan medis yang berkualitas bagi personel militer. Hal ini termasuk akses ke layanan pengobatan TBC yang terjangkau dan efektif.

Dengan pendekatan ini, pencegahan dan pengendalian TBC akan menjadi lebih efektif, sehingga mendukung kesehatan populasi militer secara keseluruhan. Pada akhirnya, investasi dalam kesehatan personel tidak hanya meningkatkan kesiapan operasional tetapi juga memperkuat pertahanan negara secara keseluruhan, menjadikan negara lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan

Pendekatan strategis yang paling efektif dalam pengendalian TBC untuk memastikan peningkatan sinergi antara Dinas Kesehatan TNI AU dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya memperkuat pertahanan negara pada periode 2025-2026.

Dalam konteks pengendalian TBC, penerapan teori manajemen risiko sangat penting untuk memastikan bahwa upaya kolaboratif antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dapat dilakukan secara efektif. Saat ini, kondisi aktual (das sein) menunjukkan bahwa belum ada strategi yang secara khusus menyasar pengendalian TBC di lingkungan militer yang terintegrasi dengan kebijakan kesehatan nasional. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan risiko terkait kesehatan personel militer, yang bisa berdampak langsung pada kesiapan operasional dan pertahanan negara

Dalam manajemen risiko, langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang ada. Dalam kasus ini, risiko utama termasuk rendahnya kesadaran tentang TBC, kurangnya fasilitas dan sumber daya untuk diagnosis dan pengobatan, serta keterbatasan dalam pelatihan tenaga kesehatan militer. Tanpa strategi yang jelas, risiko-risiko ini dapat menyebabkan meningkatnya angka kejadian TBC di kalangan personel militer, yang pada gilirannya mengancam kesiapan operasional. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah menganalisis dan menilai dampaknya. Dalam hal ini, pengendalian TBC yang tidak terintegrasi dapat mengakibatkan hilangnya tenaga kerja yang berpengalaman akibat sakit, serta biaya pengobatan yang meningkat. Melalui pendekatan strategis yang terencana, risiko ini dapat diminimalkan. Misalnya, penggunaan teknologi modern dalam deteksi dini dan pengobatan TBC dapat mempercepat identifikasi kasus, sehingga mencegah penyebaran lebih lanjut di lingkungan militer. Berdasarkan analisis risiko, pendekatan strategis (das sollen) yang paling efektif melibatkan kolaborasi erat antara kedua instansi. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mencakup pengendalian TBC sebagai bagian dari rencana kesehatan nasional. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagi data dan sumber daya, pelatihan bersama bagi tenaga kesehatan, serta pengembangan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan TBC di kalangan personel militer. Hal terpenting untuk mengembangkan rencana implementasi yang mencakup pemantauan berkala terhadap efektivitas strategi pengendalian TBC. Sistem monitoring ini akan memungkinkan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian strategi jika diperlukan, sehingga risiko kesehatan dapat dikelola secara proaktif

Menerapkan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi erat antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC adalah langkah yang krusial untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan militer. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi dan data kesehatan hingga penyelarasan kebijakan dan prosedur dalam deteksi serta pengobatan TBC. Dengan mengintegrasikan sumber daya dan keahlian kedua instansi, mereka dapat menciptakan respon pengendalian yang lebih responsif dan responsive terhadap kebutuhan kesehatan personel militer.

- 1) Penggunaan Teknologi Modern. Salah satu komponen kunci dalam pendekatan ini adalah penggunaan teknologi modern untuk deteksi dan pengobatan TBC. Misalnya, penerapan alat diagnosis berbasis teknologi terkini, seperti tes cepat dan system informasi kesehatan, dapat membantu dalam identifikasi kasus secara dini. Dengan memanfaatkan

- big data dan analitik kesehatan, kedua instansi dapat melakukan pemantauan epidemiologis yang lebih efektif, mengidentifikasi pola penyebaran, dan merespons secara cepat terhadap potensi wabah. Ini tidak hanya membantu dalam penanganan kasus individu, tetapi juga dalam perencanaan sumber daya kesehatan yang lebih baik.
- 2) Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan jangka panjang adalah aspek vital lainnya yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kasus TBC, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas dan infrastruktur kesehatan militer. Rencana jangka panjang ini dapat meliputi pengembangan fasilitas kesehatan yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis, serta kampanye kesadaran kesehatan yang terarah. Dengan menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan, kedua instansi dapat memastikan bahwa program pengendalian TBC tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam menjaga kesehatan personel.
- 3) Memperkuat Pertahanan Negara. Peningkatan sinergi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan melalui pendekatan strategis ini akan berkontribusi langsung terhadap kesiapan operasional militer. Personel militer yang sehat akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sekaligus mengurangi angka absensi yang disebabkan oleh penyakit. Dengan demikian, kesiapan dan daya tanggap militer dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, akan semakin kuat.

Dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan, termasuk penyakit menular lainnya, pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan penting bagi ketahanan negara. Dengan sinergi yang kuat dan implementasi yang efektif, Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dapat membangun sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif, siap menghadapi segala bentuk tantangan yang mungkin muncul. Melalui upaya ini, pengendalian TBC bukan hanya akan menjaga kesehatan personel, tetapi juga memperkuat posisi dan integritas pertahanan negara secara keseluruhan

Bentuk Kerjasama Dinas Kesehatan TNI AU Dengan Kementerian Kesehatan Dalam Program Pengendalian Tuberkulosis (TBC) Di Jawa Barat. Keputusan Panglima TNI Nomor 1008 Tahun 2015 menetapkan landasan hukum bagi keterlibatan TNI dalam penanganan kasus Tuberkulosis

TBC di Indonesia, terutama di daerah dengan jumlah kasus tinggi atau akses layanan kesehatan yang terbatas. Keputusan ini mengatur batasan jumlah kasus TBC sebagai kriteria dasar bagi TNI untuk terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan, yang mencakup peran logistik, medis, serta edukasi bagi masyarakat. Dengan adanya standar ini, keterlibatan TNI menjadi lebih efektif dan fokus, memastikan kapasitas dan prioritas TNI digunakan secara optimal untuk membantu penanganan TBC di lokasi-lokasi yang membutuhkan. Dalam implementasinya, TNI tidak hanya bertanggung jawab dalam dukungan logistik dan medis, tetapi juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui koordinasi lintas sektoral. Selain itu, TNI diharuskan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap intervensi yang dilakukan, sehingga hasil dari program ini dapat dievaluasi dan disesuaikan untuk efektivitas yang berkelanjutan. Melalui keputusan ini, diharapkan upaya

penganggulangan TBC menjadi lebih terpadu dan mampu mengurangi penyebaran TBC secara signifikan di wilayah- wilayah yang rentan

Pengendalian penyakit tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu prioritas kesehatan di Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat dan personel militer. Di Jawa Barat, upaya pengendalian TBC melibatkan kerjasama yang erat antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, deteksi, dan pengobatan TBC, baik di lingkungan TNI AU maupun di masyarakat secara umum. Bentuk kerjasama ini meliputi berbagai aspek penting, seperti koordinasi program, pelatihan tenaga medis, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Melalui upaya terintegrasi ini, diharapkan penyebaran TBC dapat diminimalisir, serta meningkatkan kesadaran dan penanganan penyakit menular ini secara tepat dan efektif. Bentuk kerjasama ini biasanya meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Koordinasi dan Sinergi Program. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan sangat penting dalam upaya pengendalian TBC di Jawa Barat. Kedua instansi ini bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan program yang terintegrasi guna menangani TBC secara menyeluruh, baik di lingkungan TNI AU maupun di masyarakat sekitar. Kerjasama ini mencakup penyusunan standar pelayanan kesehatan yang seragam dan terpadu, yang mencakup deteksi dini, pengobatan, dan pemantauan terhadap penderita TBC. Selain itu, distribusi obat-obatan yang tepat dan tepat waktu juga menjadi bagian dari koordinasi ini, memastikan bahwa semua pasien mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Tak kalah penting, program ini juga melibatkan penyuluhan yang intensif kepada personel TNI AU dan masyarakat mengenai cara-cara pencegahan TBC, pentingnya menjalani pengobatan secara tuntas, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyebaran penyakit ini. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan, program pengendalian TBC dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
- 2) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas merupakan salah satu aspek kunci dalam kerjasama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC. Kedua instansi ini menyelenggarakan pelatihan untuk tenaga medis di lingkungan TNI AU, baik di fasilitas kesehatan militer maupun di fasilitas kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi dini gejala TBC, yang sangat penting untuk meminimalisir penyebaran penyakit sejak tahap awal. Selain itu, pelatihan ini juga fokus pada pengobatan yang tepat dan sesuai standar, termasuk pemahaman mengenai penggunaan obat-obatan antituberkulosis dan pengelolaan pasien TBC dengan kondisi yang beragam. Dengan adanya pelatihan yang intensif dan terfokus, tenaga medis di TNI AU dan fasilitas kesehatan terkait diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengidentifikasi kasus TBC dengan lebih cepat, serta memberikan pengobatan yang efektif dan tepat kepada pasien, baik di lingkungan militer maupun masyarakat luas.

- 3) Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan elemen penting dalam kerjasama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian TBC di Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dalam penanggulangan TBC efektif dan memberikan dampak positif. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengawasi pelaksanaan program, termasuk distribusi obat, deteksi dini, serta pengobatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai hasil dan kemajuan yang dicapai, dengan menggunakan data epidemiologi yang mencakup angka kasus TBC di Jawa Barat. Data ini akan dianalisis secara bersama oleh kedua instansi untuk mengidentifikasi tren kasus, area dengan prevalensi tinggi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Berdasarkan hasil analisis ini, tindakan lebih lanjut dapat dirancang, seperti penyesuaian strategi pengendalian, perbaikan dalam distribusi sumber daya, atau peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan pemantauan dan evaluasi yang sistematis, program pengendalian TBC di Jawa Barat dapat lebih responsif terhadap perubahan situasi dan lebih efektif dalam menurunkan angka kasus TBC.
- 4) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat. Penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan bagian integral dari program pengendalian TBC yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan TNI AU. Melalui kerjasama ini, kedua instansi menyelenggarakan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran personel TNI AU serta masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini TBC. Edukasi ini mengedepankan informasi tentang tanda dan gejala awal TBC, sehingga individu dapat segera mendapatkan pemeriksaan medis dan diagnosis yang tepat. Selain itu, kampanye ini juga mengajarkan cara pencegahan TBC, seperti menjaga kebersihan pernapasan, penggunaan masker, serta pentingnya pola hidup sehat dan nutrisi yang baik untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Salah satu fokus utama dalam penyuluhan adalah pentingnya pengobatan yang tuntas bagi pasien TBC, agar tidak terjadi kekambuhan atau resistensi terhadap obat. Dengan pemberian informasi yang tepat dan jelas, diharapkan masyarakat dan personel TNI AU dapat lebih memahami cara mencegah penyebaran TBC dan menjalani pengobatan dengan disiplin, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kasus TBC di Jawa Barat
- 5) Penguatan Fasilitas Kesehatan. Penguatan fasilitas kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kerjasama antara Dinas

Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian TBC di Jawa Barat. Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan militer (Fasyankes TNI AU) dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas ini memiliki sumber daya yang memadai dalam menangani pasien TBC. Hal ini mencakup penyediaan obat-obatan yang sesuai dengan standar pengobatan TBC, alat-alat medis yang dibutuhkan untuk diagnosis dan pengobatan, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penguatan juga meliputi peningkatan infrastruktur dan pelatihan tenaga medis di fasilitas kesehatan militer, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman pengendalian TBC. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih siap, baik dari segi peralatan medis maupun SDM yang terlatih, program pengendalian TBC dapat dijalankan

‘dengan lebih efektif. Ini juga memastikan bahwa personel TNI AU dan masyarakat di Jawa Barat mendapatkan perawatan yang optimal, serta memperkuat kemampuan Fasyankes TNI AU dalam mendeteksi, merawat, dan mengobati TBC secara menyeluruh

Dengan kerjasama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam pengendalian TBC, diharapkan penyebaran penyakit ini dapat diminimalisir di lingkungan TNI AU dan masyarakat di Jawa Barat. Kerjasama ini mengintegrasikan berbagai upaya, mulai dari deteksi dini, pengobatan yang tepat, hingga penyuluhan yang menyeluruh kepada personel TNI AU dan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta kampanye edukasi, kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan penanganan TBC akan semakin meningkat. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus, program ini dapat disesuaikan dengan kondisi terkini untuk meningkatkan efektivitasnya. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa TBC dapat dikendalikan dengan baik, sehingga penularan dapat ditekan dan penanganan terhadap pasien lebih tepat. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya mengurangi jumlah kasus TBC, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pernapasan dan pengobatan yang tuntas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kerja sama antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian TBC di lingkungan militer telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan koordinasi terintegrasi, perbedaan prosedur operasional, serta kendala anggaran yang memengaruhi optimalisasi program. Selain itu, stigma sosial terkait TBC turut menjadi penghambat dalam penanganan kasus secara efektif. Temuan penelitian menegaskan bahwa kesehatan personel militer memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan operasional dan pertahanan negara. Personel yang terinfeksi TBC mengalami penurunan produktivitas yang berdampak pada kemampuan operasional, sementara personel sehat mampu menjalankan tugas dengan optimal. Oleh karena itu, pengendalian TBC yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pertahanan nasional.

Untuk memperkuat sinergi kedua institusi, penelitian ini merekomendasikan pendekatan strategis yang mencakup penyelarasan kebijakan, peningkatan alokasi sumber daya, serta pelatihan tenaga medis. Penguatan sistem pemantauan dan kampanye edukasi juga diperlukan untuk mengurangi stigma serta meningkatkan deteksi dini. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, kolaborasi antara Dinas Kesehatan TNI AU dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat lebih efektif dalam menekan angka TBC sekaligus mendukung kesiapan pertahanan negara pada periode 2025-2026. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam kajian kolaborasi lintas sektor, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang program kesehatan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. (2020). Pengetahuan Penderita Tuberkulosis Paru Terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis. *Jambura Health and Sport Journal*, 2(1), 12–18.

- <https://doi.org/10.37311/jhsj.v2i1.4560>
- Barza, K., Damanik, E., & Wahyuningsih, R. (2021). Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis Di Rs Medika Dramaga. *Jurnal Farmamedika*, 6(2), 42–47. <http://ejournal.sttif.ac.id/index.php/farmamedika/article/view/121>
- Editia, Y. V, Nugroho, G. S., & Yunritati, E. (2023). Hubungan Status Gizi Dengan Tuberkulosis: Systematic Review \& Meta-Analisis. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 149–157.
- Hartanto, Y. A. (2016). Manajemen Logistik Dalam Meningkatkan Kesiapan Tempur Alutsista TNI AL. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 6(1), 193–212.
- Indonesia, P. D. P. (2021). *Tuberkulosis Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*.
- Hernández, M. C., & Ochoa, R. F. (2020). Integrating health and defense: The role of military medicine in tuberculosis control. *International Journal of Military Medicine*, 85(3), 155–162. <https://doi.org/10.1007/s00295-020-00254-5>
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Rencana aksi nasional penanggulangan tuberkulosis Indonesia 2016–2020*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI.
- KNCV. (2022). *Tuberkulosis / TBC*. KNCV Indonesia. <https://yki4tbc.org/tuberkulosis-tbc/>
- Kristiana, R. (2022). *Manajemen risiko*. CV Mega Press Nusantara.
- Kurniawati, A., Padmawati, R. S., & Mahendradhata, Y. (2019). Acceptability of mandatory tuberculosis notification among private practitioners in Yogyakarta, Indonesia. *BMC Research Notes*, 12, 543. <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4581-9>
- Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). *The Republic of Indonesia health system review* (K. Hort & W. Patcharanarumol, Eds.; Vol. 7, Issue 1). World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/254716>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- World Health Organization. (2018). *Global tuberculosis report 2018*. <https://doi.org/ISBN978-92-4-156564-6>
- World Health Organization. (2019a). *People-centred framework for tuberculosis programme planning and prioritization: User guide*. <http://apps.who.int/iris>
- World Health Organization. (2019b). *The END TB strategy: Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015*. <https://www.who.int/tb/strategy/end-tb/en/>
- World Health Organization. (2019c). *WHO global ministerial conference: New global commitment to end tuberculosis*. <https://www.who.int/conferences/tb-global-ministerial-conference/en/>
- World Health Organization. (2022). *Global tuberculosis report 2022*. KNCV Indonesia.